

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan produksi barang jasa dalam jangka waktu tertentu. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah (Sukirno, 2010). Talangamin *et al*, (2019) mengatakan bahwa proses pertumbuhan ekonomi mempunyai kaitan erat dengan perubahan struktural dan sektoral yang tinggi.

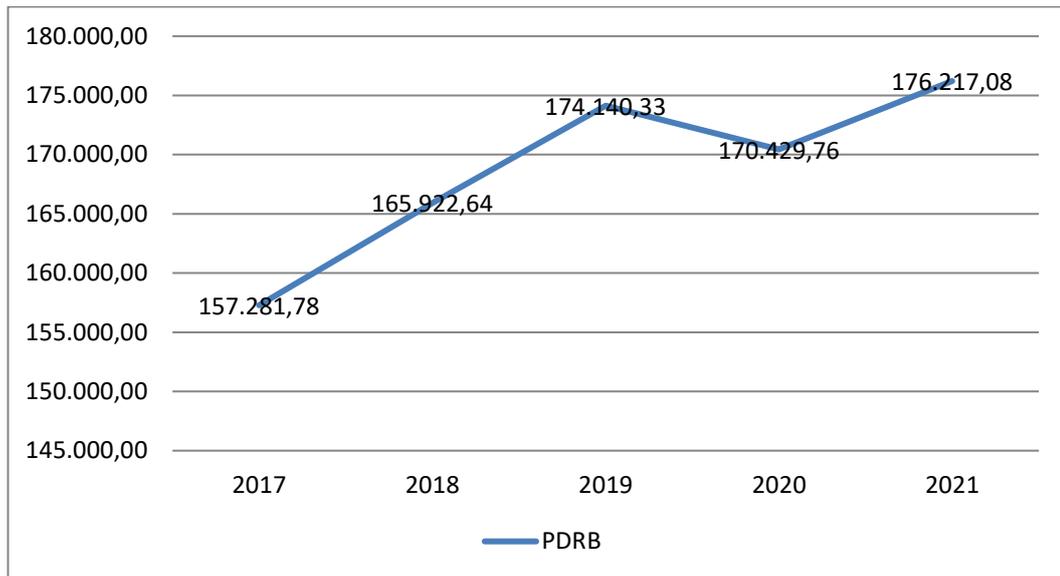
Pertumbuhan ekonomi suatu daerah biasanya diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau sektor-sektor ekonomi dalam suatu wilayah dan periode waktu tertentu (Mutiara, 2015). PDRB perkapita mencerminkan pendapatan rata-rata yang diperoleh di suatu daerah, sehingga jika pendapatan tersebut besar, masyarakat cenderung memiliki pengeluaran yang lebih besar untuk kebutuhannya., sehingga dapat memenuhi kebutuhannya (Yuswara, 2020).

Indonesia merupakan negara yang sedang berkembang, yang mana pendapatannya masih rendah sehingga pemerintah perlu menitik beratkan prioritas pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi di Indonesia saat ini tidak merata, hal ini terbukti dari besarnya ketimpangan antar

daerah di Indonesia yang masih terus terjadi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS, 2019), distribusi Produk Domestik Bruto (PDB) yang masih didominasi oleh Pulau Jawa dan Sumatera sebesar 80% dari total PDB Nasional. Hal ini mengindikasikan kurang meratanya pembangunan yang terjadi di Indonesia. Jika ini terus terjadi maka akan mengakibatkan ketimpangan antar daerah yang semakin besar.

Provinsi Sumatera Barat merupakan salah satu dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia yang dibagi menjadi 12 Kabupaten dan 7 Kota. Perbedaan karakteristik dari kabupaten/kota dilihat dari letak geografis dan potensi sumber daya yang dimiliki, masing-masing wilayah Kabupaten/Kota mempunyai pengaruh yang kuat terhadap terciptanya pola pembangunan ekonomi di Provinsi Sumatera Barat. Perbedaan karakteristik dari Kabupaten/Kota menyebabkan terjadinya pola pembangunan ekonomi yang tidak seragam (Rhamedia, 2022).

Alasan pemilihan lokasi Sumatera Barat sebagai objek penelitian yaitu diketahui kondisi masing-masing daerah di Sumatera Barat yang berbeda-beda menimbulkan konsekuensi akan adanya kesenjangan kemampuan dalam pelaksanaan pembangunan dan pelayanan publik. Sehingga dapat menimbulkan berbagai masalah pengelolaan sumber-sumber potensi daerah guna meningkatkan PDRB di Sumatera Barat. Terlebih adanya pandemi covid-19 yang melanda, sehingga peneliti tertarik memilih variabel DAU, DAK, Pajak Daerah, dan Belanja Daerah dalam kaitannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat yang dilihat dari tingkat PDRB. Berikut data PDRB provinsi Sumatera Barat dari 2017-2021 :



Sumber : BPS (data diolah),2024

**Gambar 1.1 Tingkat PDRB di Sumatera Barat 2017-2021 (Juta)**

Berdasarkan Grafik 1.1 diatas, dapat dilihat bahwa PDRB provinsi Sumatera Barat cenderung meningkat dari tahun 2017-2019. Tahun 2017 Rp 157.281,78,- kemudian tahun 2018 Rp 165.922,64,- dan pada tahun 2019 Rp 174.140,33,-Peningkatan ini didorong oleh struktur ekonomi di Sumatera Barat sejumlah lapangan usaha utama yaitu pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor maupun mobil serta transportasi dan pergudangan. Dan kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 170.429,76,- diakibatkan dampak pandemi Covid-19 yang melanda Sumatera Barat. Tahun 2021 meningkat kembali sebesar Rp 176.217,08,- yang disebabkan pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19 yang melanda.

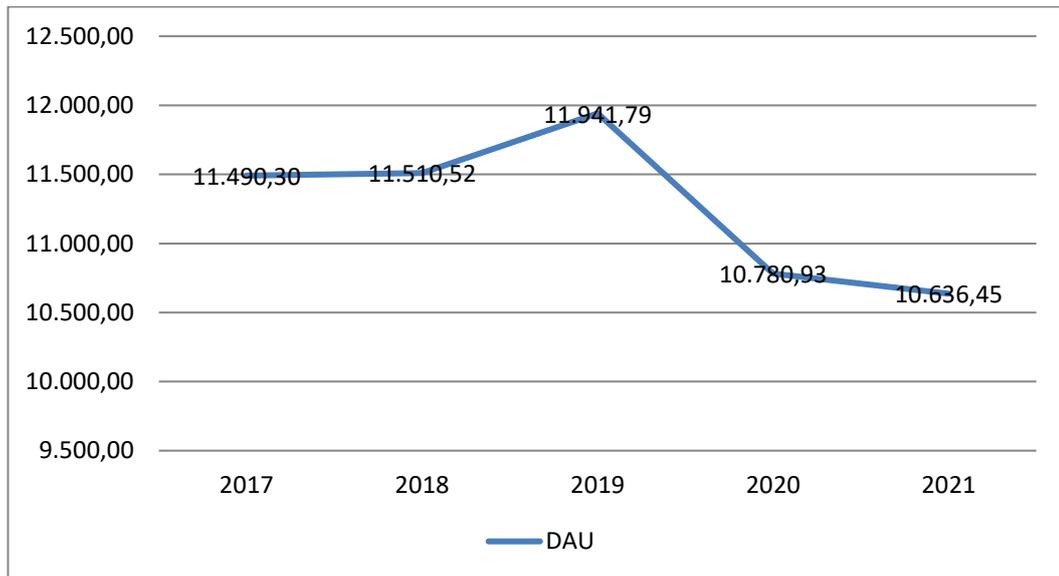
Dengan melihat perkembangan PDRB tersebut, bahwa Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewajiban untuk memastikan bahwa PDRB tersebut dapat mencapai kemakmuran dan kesejahteraan bagi masyarakat.Kesejahteraan

masyarakat dapat dicapai apabila kegiatann ekonomi terus meningkat melalui peningkatan PDRB (Sari, 2018).

Provinsi Sumatera Barat adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang terdiri dari 12 Kabupaten 7 Kota. Diantara 12 kabupaten 7 kota tersebut dijadikan pemekaran daerahnya. Pemberian otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap PDRB suatu daerah karena memberi kebebasan kepada pemerintah daerah tersebut untuk membuat rencana keuangannya sendiri dan membuat kebijakan-kebijakan yang dapat berpengaruh pada kemajuan daerahnya (Mokoginta *et al.*, 2023).

Tingkat PDRB menjadi salah satu tujuan penting pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Faktor utama bagi daerah untuk mendorong PDRB adalah dengan meningkatkan dana perimbangan. Dana perimbangan yang diberikan kepada daerah terdiri atas Dana Transfer Umum dan Dana Transfer Khusus. Dana Transfer Umum adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan antar keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalamrangka pelaksanaan desentralisasi(Murtala & Iskandar, 2020).

Dana Alokasi Umum begitu besar sehingga merupakan sumber pendapatan terpenting bagi semua pemerintah daerah dalam anggaran pendapatan APBN nya. Oleh karena itu Dana Alokasi Umum dapat dilihat sebagai tanggapan pemerintah terhadap keinginan daerah untuk lebih mengontrol keuangan publik (Halim, 2002) dalam (Hanif Fuady & Weriantoni, 2023). Berikut grafik data dana alokasi umum Provinsi Sumatera Barat :



Sumber : Kemenkeu (data diolah),2024

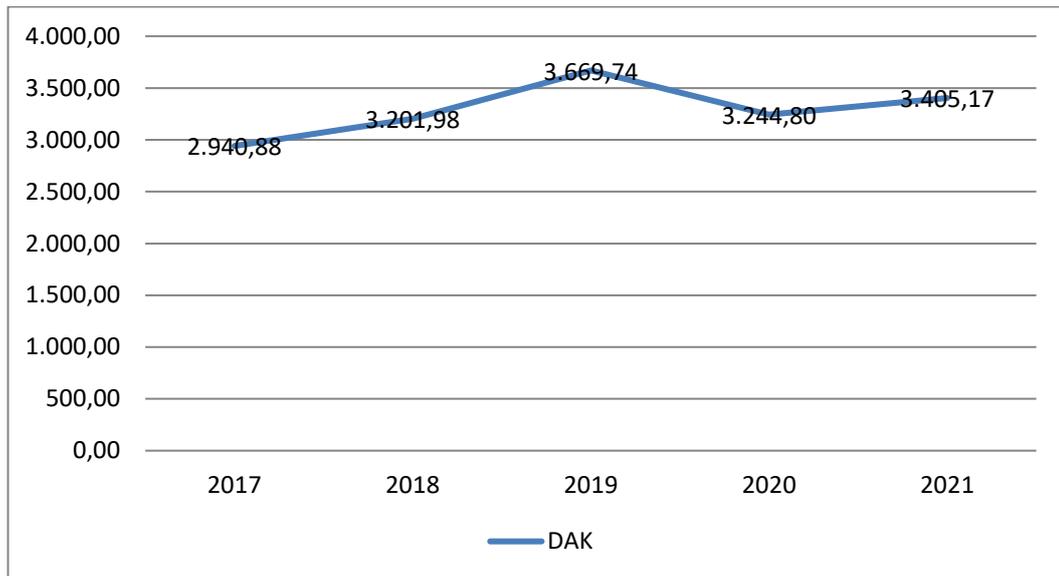
**Gambar 1.2 Tingkat DAU Sumatera Barat 2017-2021 (Miliar)**

Berdasarkan Gambar 1.2 dapat dilihat bahwa jumlah Dana Alokasi Umum mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017-2019. Mengalami peningkatan sedikit dari tahun 2017-ke 2018 yaitu Rp 11.490,30,- hingga Rp 11.510,52,- tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 11.941,79,-. Peningkatan ini disebabkan oleh penambahan pegawai di Provinsi Sumatera Barat yang merupakan salah satu indikator dalam penentuan besarnya Dana Alokasi Umum. Jika dikaitkan dengan data PDRB Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yang berarti peningkatan Dana Alokasi Umum diikuti oleh pertumbuhan PDRB, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuvanda et al., (2023) berarti DAU meningkat PDRB juga meningkat. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 10.780,93,- hal ini terjadi akibat penurunan pendapatan yang ditransfer oleh pemerintah pusat disebabkan dana dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tahun 2021 mengalami sedikit penurunan

sebesar Rp 10.636,45,- penurunan ini disebabkan oleh banyaknya pemda yang belum memenuhi persyaratan penyaluran sesuai PMK sehingga penyaluran DAU tertunda, dilihat data PDRB tahun 2021 justru mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Yuvanda et al., (2023). Yang seharusnya secara teori jika Dana Alokasi umum menurun maka PDRB menurun juga.

Menurut Rasu et al., (2019) dalam (Nugraha & Soebagyo, 2021) Selain Dana Alokasi Umum (DAU), ada Dana Alokasi Khusus (DAK). DAU dan DAK tidak dapat dipisahkan, dengan arti bahwa mempunyai fungsi yang sama. Tetapi ditujukan kepada daerah khusus yang terpilih untuk tujuan khusus dan dijadikan sebagai prioritas nasional. Penggunaan anggaran DAK ditujukan untuk kegiatan investasi jangka panjang, jangka pendek, peningkatan kinerja daerah, perbaikan dan peningkatan sarana dan prasarana pelayanan masyarakat tergolong dalam prioritas nasional dengan umur ekonomis yang panjang dan termasuk pengeluaran belanja.

Pada dasarnya DAK digunakan dalam memberikan biaya dalam pembiayaan khusus beberapa pada sektor daerah serta berdasarkan oleh prioritas negara, terutama dalam memberikan biaya keperluan fasilitas layanan standar tertentu dalam mempercepat pembangunan daerah (Derise 2008) dalam (Fitriani & Hendaris, 2023). Berikut grafik DAK Provinsi Sumatera Barat :



Sumber : Kemenkeu (data diolah),2024

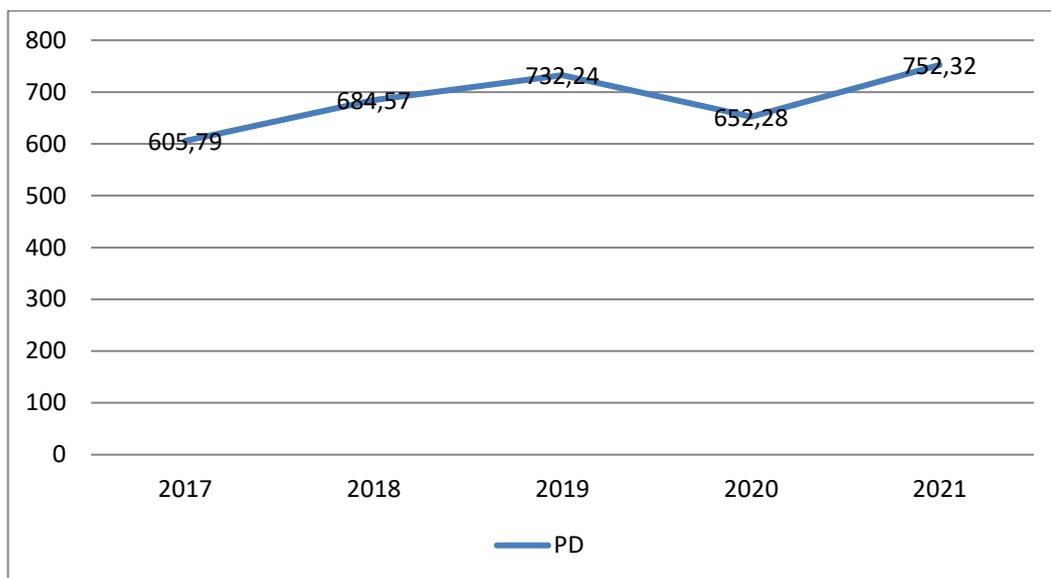
**Gambar 1.3 Tingkat DAK Sumatera Barat 2017-2021 (Miliar)**

Berdasarkan Gambar 1.3 diatas dapat dilihat bahwa jumlah Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017-2019. Mengalami peningkatan dari tahun 2017-ke 2018 yaitu Rp 2.940,88,- hingga Rp 3.201,98,- tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.669,74,- peningkatan ini menandakan bahwa pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah menunjukkan kinerja yang baik. Jika dikaitkan dengan data PDRB Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yang berarti peningkatan Dana Alokasi Khusus diikuti oleh pertumbuhan PDRB, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Karina, (2019) yang menyatakan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. berarti DAK meningkat PDRB juga meningkat. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 3.244,80,- hal ini terjadi akibat penurunan pendapatan yang ditransfer

oleh pemerintah pusat disebabkan dana dialihkan untuk penanganan Covid-19. Tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar Rp 3.405,17,-.

PDRB tidak hanya mengukur tingkat output dalam suatu perekonomian, namun sesungguhnya juga memberikan indikasi tentang sejauh mana aktifitas perekonomian yang terjadi pada suatu periode tertentu telah menghasilkan Pendapatan (Miswar *et al.*, 2021). Pendapatan dapat berupa dana yang dibutuhkan pemerintah untuk membiayai kegiatannya. Pendapatan daerah tersebut dapat melalui pajak daerah (Made *et al.*, 2020).

Pajak daerah adalah pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut. Hal ini sesuai dengan UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang mengungkapkan bahwa Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah (Naibaho *et al.*, 2021). Provinsi Sumatera Barat dituntut agar mampu mengalokasikan hasil pajak yang diterima sampai kepada penciptaan masyarakat yang adil, makmur, dan merata seperti Pancasila dan undang-undang dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (Mina & Ratna, 2020). Berikut data pajak daerah provinsi Sumatera Barat:



Sumber : Kemenkeu (data diolah),2024

**Gambar 1.4 Tingkat Pajak Daerah Sumatera Barat 2017-2021 (Miliar)**

Berdasarkan Gambar 1.4 dapat diketahui terlihat diatas dapat dilihat bahwa jumlah Pajak Daerah mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari tahun 2017-ke 2018 yaitu Rp 605,79,- hingga Rp 684,57,- tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 732,24,-. Peningkatan ini disebabkan oleh penerimaan PBB Perdesaan dan Perkotaan dan pajak hotel serta yang memberikan kontribusi yang besar terhadap pajak Sumatera Barat yaitu pajak kendaraan bermotor, sehingga penerimaan pajak meningkat. Jika dikaitkan dengan data PDRB Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yang berarti peningkatan Pajak Daerah diikuti oleh pertumbuhan PDRB, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Mutiara, (2015) yang menyatakan bahwa Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB. berarti Pajak Daerah meningkat PDRB juga meningkat. Kemudian tahun 2020 mengalami penurunan sebesar Rp 652,28,- hal ini terjadi akibat penurunan

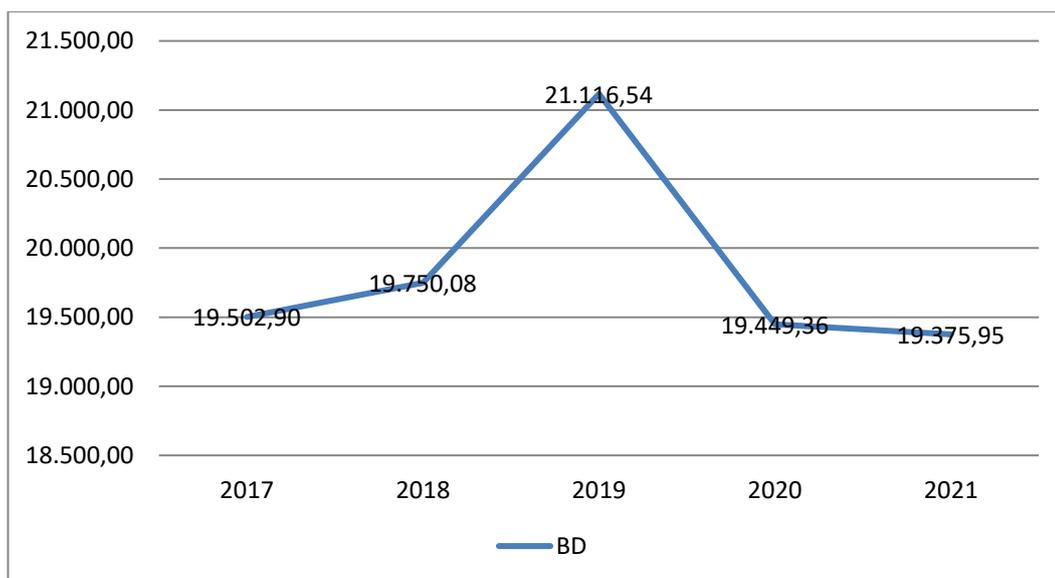
karena kurangnya penerimaan pajak yang dikarenakan kondisi pandemi Covid-19 sehingga kurang penerimaan pajak seperti pajak hotel dimana kunjungan wisatawan ke Sumatera Barat berkurang karena pandemi. Tahun 2021 mengalami peningkatan lagi sebesar Rp 752,32,-.

Peran pemerintah dalam upaya meningkatkan PDRB dan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah peran alokatif, dimana pemerintah harus menyusun kebijakan untuk mengalokasikan belanja daerah (Deswanto et al., 2017). Belanja Daerah merupakan hal yang tak terpisahkan dari bagian pendapatan maupun pembiayaan dalam sistem APBD berbasis kinerja. Kualitas APBD adalah bagian dari kinerja pemerintah daerah, karena dapat mencerminkan bagaimana suatu daerah tersebut membelanjakan anggarannya dengan tepat. Belanja Daerah memiliki standar pelayanan minimal yang sangat dibutuhkan oleh pemerintah daerah untuk menentukan seberapa besar anggaran yang harus dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. (Amanda & Praptoyo, 2023).

Pengalokasian anggaran merupakan masalah yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus mampu mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif (Rahmitasari & Asyik, 2023).

Dalam pengalokasiannya besar kecil Belanja Daerah disebabkan oleh beberapa faktor yang mempengaruhi yang mana apabila faktor tersebut dikelola

dengan baik maka akan meningkatkan Belanja Daerah dan apabila Belanja Daerah meningkat maka kebutuhan akan kepentingan daerah juga akan meningkat serta membuat perekonomian menjadi lebih baik (Putri *et al*, 2021). Berikut data perkembangan belanja daerah Provinsi Sumatera Barat :



Sumber : Kemenkeu (data diolah),2024

**Gambar 1.5 Tingkat Belanja Daerah Sumatera Barat 2017-2021 (Miliar)**

Berdasarkan Gambar 1.5 dapat diketahui bahwa jumlah Belanja Daerah mengalami peningkatan yaitu dari tahun 2017-2019 mengalami peningkatan dari tahun 2017 hingga 2018 yaitu Rp 19.502,90,- hingga 19.750,08,- tahun 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp 21.116,54,-. Peningkatan ini didorong oleh meningkatnya belanja modal dan belanja barang dan jasa di Provinsi Sumatera Barat . Jika dikaitkan dengan data PDRB Sumatera Barat juga mengalami peningkatan dari tahun 2017-2019 yang berarti peningkatan Belanja Daerah diikuti oleh pertumbuhan PDRB, hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sari, (2018) yang menyatakan bahwa belanja daerah berpengaruh positif dan

signifikan terhadap PDRB. Berarti Belanja Daerah meningkat PDRB juga meningkat. Pada tahun 2020 Belanja Daerah mengalami penurunan yang disebabkan pandemi Covid-19 sehingga pemerintah daerah harus memprioritaskan program-program terkait penanganan Covid-19. Pada tahun 2021 mengalami penurunan sebesar Rp 19.375,95,- hal ini disebabkan beberapa faktor seperti kebijakan efisiensi seiring dengan penurunan realisasi pendapatan daerah serta banyaknya pertanggungjawaban belanja yang belum direalisasikan. Dilihat data PDRB justru mengalami peningkatan, hal ini berbanding terbalik dengan penelitian Sari, (2018) Yang seharusnya secara teori jika Belanja Daerah menurun maka PDRB menurun juga.

Berdasarkan pemilihan variabel-variabel penelitian diatas yaitu Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Belanja Daerah di Provinsi Sumatera Barat diharapkan pemerintah dapat menggunakan dana ini dengan efektif dan efisien untuk peningkatan pelayanan pada masyarakat dengan disertai pertanggungjawaban atas penggunaan dana tersebut (Islami & Nababan, 2020). Sehingga dapat mempengaruhi PDRB di Provinsi Sumatera Barat.

Sejauh ini telah banyak yang meneliti mengenai PDRB yang berkaitan dengan dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pajak daerah, dan belanja daerah. Penelitian yang dilakukan oleh (Karina, 2019) menunjukkan bahwa Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan dan positif terhadap PDRB, selanjutnya yaitu penelitian dilakukan oleh (Yuvanda et al., 2023) dengan hasil penelitian DAU berpengaruh positif terhadap PDRB. Kemudian penelitian dilakukan oleh (Mutiara, 2015) menunjukkan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan dan

memiliki hubungan yang positif terhadap PDRB dan penelitian yang dilakukan oleh (Sari, 2018) dengan hasil penelitian bahwa Belanja Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PDRB.

Berdasarkan dari uraian latar belakang diatas dan hasil penelitian yang berubah dari waktu ke waktu ini membuat penulis tertarik meneliti mengenai “Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Pajak Daerah, dan Belanja Daerah terhadap PDRB di Sumatera Barat.”

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat disimpulkan masalah sebagai berikut :

1. Seberapa besar pengaruh dana alokasi umum berpengaruh terhadap PDRB di kabupaten/kota Sumatera Barat?
2. Seberapa besar dana alokasi khusus berpengaruh terhadap PDRB di kabupaten/kota di Sumatera Barat?
3. Seberapa besar pajak daerah berpengaruh terhadap PDRB di kabupaten/kota di Sumatera Barat?
4. Seberapa besar belanja daerah berpengaruh terhadap PDRB di kabupaten/kota di Sumatera Barat?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu untuk :

1. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap PDRB kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat
2. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap PDRB kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat
3. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PDRB kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat
4. Mengetahui seberapa besar Pengaruh Belanja Daerah terhadap PDRB kabupaten/kota Di Provinsi Sumatera Barat.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

##### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Adapun hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Memberikan gambaran kepada pembaca mengenai bagaimana Pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pajak daerah, dan belanja daerah terutama pengaruh setiap variabel bebas terhadap variabel terikat.
2. Hasil penelitian ini akan memperkaya literatur ilmiah, memperdalam teori karena penulisan ini dilakukan dari sumber referensi terpercaya dan dapat berguna untuk kegiatan akademik bagi peneliti sendiri dan fakultas.

##### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Adapun manfaat praktis yang di harapkan dalam hasil penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi dan acuan peneliti selanjutnya, yang ingin mengembangkan penelitian di bidang pengaruh dana alokasi umum, dana alokasi khusus, pajak daerah, belanja daerah
2. Penelitian ini bersifat kuantitatif berupa angka dan data sehingga dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah serta masukan bagi pengembangan ilmu ekonomi dan studi pembangunan lainnya.